

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI, DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

AFIYATUL LUTFIYANA
NIM : 4319127

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI, DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

AFIYATUL LUTFIYANA
NIM : 4319127

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afiyatul Lutfiyana
NIM : 4319127
Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap *Good Governance* di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 April 2023

Yang menyatakan



Afiyatul Lutfiyana

NOTA PEMBIMBING

Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si
Desa Temuireng, Petarukan-Pemalang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi sdr. Afiyatul Lutfiyana

Yth.
Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

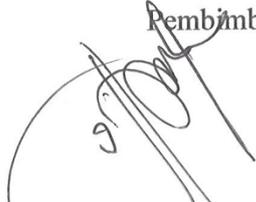
Nama : Afiyatul Lutfiyana
NIM : 4319127
Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap *Good Governance* di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 31 Maret 2023

Pembimbing


Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si
NIP. 19841031201981001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Afiyatul Lutfiyana**
NIM : **4319127**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Good Governance di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**
Dosen Pembimbing : **Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si**

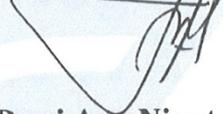
Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I


Ade Gunawan, M.M
NIP.198104252015031002

Penguji II


Gilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si
NIP.199101092020122016

Pekalongan, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP.197502201999032001

MOTTO

“Sebaik-baiknya Manusia Adalah Mereka Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain”

HR. Ath-Thabrani

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Khodlirin dan Ibu Khanifah yang selalu mendoakan serta mendukung baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
2. Adik saya, Shinva Asila sebagai motivasi saya untuk selalu melakukan hal yang terbaik
3. Sahabat seperjuangan Akuntansi Syariah selama perkuliahan hingga pembuatan skripsi Rofiqotul Umah, Naela Arbach, dan Khilyatul Maula yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si yang selalu membantu serta mengarahkan penelitian hingga penulisan Skripsi ini terselesaikan.
5. Dosen Wali, Ibu Karima Tamara, M.M yang selalu mengarahkan dalam masa perkuliahan.
6. Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah 2019 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.
7. Ziyah Nuzulan Na'im yang selalu membantu dan menyupport dalam penyelesaian Skripsi.
8. Almameter UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ABSTRAK

AFIYATUL LUTFIYANA. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap *Good Governance* Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Adanya berbagai kasus korupsi dan permasalahan dana desa di Indonesia yang berdampak pada pembangunan desa serta tata wilayahnya dalam menuju tata kelola desa yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh dari kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap *good governance* di Kecamatan Tirto.

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan alat analisis SEM-PLS yang diolah dengan software SmartPLS 3.0. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner serta menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 96 orang yang terdiri dari aparatur desa di Kecamatan Tirto.

Ditemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance*. Sedangkan partisipasi masyarakat dan Transparansi tidak mempengaruhi *good governance* di Kecamatan Tirto.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, *Good Governance*.

ABSTRACT

There are various cases of corruption and problems with village funds in Indonesia which have an impact on village development and regional planning towards good village governance. The purpose of this study was to examine the influence of village apparatus competence, community participation, transparency and accountability of village fund management on good governance in Tirto District. This research is quantitative by using the SEM-PLS analysis tool which is processed with SmartPLS 3.0 software. The type of data used is primary data with data collection techniques using the questionnaire method and using purposive sampling techniques so that the sample used in the study totaled 96 people consisting of village apparatus in Tirto District. The result found that the competence of the village apparatus and the accountability of managing village funds had an effect on good governance. Meanwhile, community participation and transparency do not affect good governance in Tirto District.

Keywords: Village apparatus competence, Community Participation, Transparency, Accountability, Good Governance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Ibu Karima Tamara, M.M selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Bapak Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan Pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini

8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan material dan moral.
9. Seluruh Aparatur Desa di Kecamatan Tirto yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
10. Sahabat saya Rofiqotul Umah, Naela Arbach, Khilyatul Maula dan semua teman yang telah meberikan do'a, dukungan dan semangat selama menjalani perkuliahan dan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 April 2023

Penulis,



Afiyatul Lutfiyana

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Landasan Teori	14
B. Telaah Pustaka	21
C. Model Penelitian	33
D. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Setting Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Variabel Penelitian	40

E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Objek Penelitian	47
B. Hasil Analisis Data	50
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Keterbatasan Penelitian	74
C. Saran.....	75
D. Implikasi Teoritis Praktis	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	I

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa	7
Tabel 2.1 Telaah Pustaka.....	23
Tabel 3.1 Jumlah Sampel	39
Tabel 3.2 Variabel Operasional.....	40
Tabel 4.1 Distribusi Kuisisioner	48
Tabel 4.2 Karakteristik Responden di lihat dari Jenis Kelamin	48
Tabel 4.3 Karakteristik Responden di lihat dari usia	49
Tabel 4.4 Karakteristik Responden di lihat dari Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4.5 Karakteristik Responden di lihat dari Lama Bekerja	50
Tabel 4.6 Hasil Skema PLS Awal	52
Tabel 4.7 Hasil Skema PLS setelah penghapusan.....	53
Tabel 4.8 Nilai Loading factor dari outer loading.....	56
Tabel 4.9 Tabel AVE pada Fornell Lacker	57
Tabel 4.10 Nilai VIF.....	59
Tabel 4.11 Cronbach Alpha.....	60
Tabel 4.12 Uji R ²	62
Tabel 4.13 Hasil Uji signifikansi statistik	64
Tabel 4.14 Hasil Uji signifikansi Hipotesis.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Model Skema Awal	51
Gambar 4.2 Outer Model Sebelum Penghapusan.....	52
Gambar 4.3 Outer Model Setelah Penghapusan.....	54
Gambar 4.4 Bootstrapping.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian.....	II
Lampiran 2. Data Responden	X
Lampiran 3. Data hasil kuisisioner	XVII
Lampiran 4. Hasil Output PLS	XXXI
Lampiran 5. Surat izin penelitian dari kampus	XXXV
Lampiran 6. Surat izin penelitian dari kecamatan	XXXVI
Lampiran 7. izin penelitian ke BAPPEDA Kab. Pekalongan	XXXVII
Lampiran 8. Bukti Tanda izin telah mengambil data penelitian.....	XXXVIII
Lampiran 9. Dokumentasi	XLII
Lampiran 10. Daftar riwayat hidup	XLIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari seperangkat ketentuan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam berperan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa selaku kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah berhak untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan kepentingan warga hak keturunan serta hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Perihal ini mengartikan dalam Undang- Undang, desa itu mempunyai cita- cita demi menciptakan desa yang maju, kokoh, mandiri, serta demokratis. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, hal yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan terlaksananya pemberdayaan tersebut maka impian masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan hukum yang berwenang dalam keefektifan keuangan serta aset desa dapat terwujud, sehingga masyarakat lebih sejahtera.

Menurut Mardiasmo (2018) *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen dengan pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Pelaksanaan *good governance* memerlukan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor yang diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Menurut Sulistiyani 2004 dalam Riyanto et al., (2021) menyatakan bahwa kunci terlaksananya

tata kelola pemerintah yang baik yaitu terdapatnya Transparansi dan Akuntabilitas. Karena suatu bangsa tidak bisa dikatakan maju dan sejahtera apabila tidak ada akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan layanan publik yang bermutu di suatu lembaga pemerintah. Selain itu membangun akuntabilitas dalam pelaporan kinerja dan pembangunan secara transparan perlu dilakukan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya (Nainggolan, 2022).

Hal tersebut sepemikiran dengan peneliti sebelumnya yaitu Ivanovik et al., (2022), Asmoro & Setianingsih, (2019) dan Nugroho et al., (2019) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas mempengaruhi *good governance* secara signifikan. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian Prabawa et al., (2020) dan Iswahyudi et al., (2017) yang mengemukakan Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak mempengaruhi upaya mewujudkan *good governance* secara positif dan signifikan.

Selain itu adanya kasus di Desa Pacar Kecamatan Tirto yang dilakukan oleh Gerakan Warga Peduli Desa Pacar (GEWAPEPPA) pada tanggal 26 Juni 2020 untuk menuntut transparansi rencana anggaran biaya terkait pembangunan lapangan bola voli karena kurangnya keterbukaan pihak pemerintah desa terhadap warga dalam pembangunan lapangan tersebut. Warga curiga dengan anggaran 277 juta, karena dari jumlah anggaran tersebut warga menganggap pembangunan lapangan bola voli tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Hal tersebut diketahui dengan perkataan saksi ahli proyek yang menyatakan pembangunan lapangan bola

voli tidak menghabiskan dana sebesar itu. Warga menuntut pemerintah Desa Pacar untuk terbuka terkait anggaran pembangunan lapangan bola voli. Dari kejadian tersebut Camat Tirto Agus Dwi Nugroho mengatakan bahwa kasus tersebut agar tidak terulang kembali dan menjadikan pelajaran bahwa transparansi sangat penting dilaksanakan (Rendi Ahmad, 2020).

Dari pernyataan di atas mengandung arti bahwa transparansi merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan *good governance* suatu pemerintahan. Dengan transparansi maka suatu keadilan dapat tumbuh apabila diimbangi dengan keterbukaan di setiap kebijakan maupun keputusan. Hal tersebut sepemikiran dengan penelitian Asmoro & Setianingsih, (2019), dan Rijal et al., (2021), Iswahyudi et al., (2017) yang mengemukakan Transparansi mempengaruhi *good governance* secara positif dan signifikan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sukmawati & Nurfitriani, (2019) yang mengemukakan bahwa transparansi tidak mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Selain akuntabilitas dan transparansi, aparatur desa juga merupakan faktor terpenting dalam menciptakan *good governance*. Berkaca dari adanya kasus kepala desa dan bendahara desa Glandang kecamatan Bantar Bolang Pemalang yang korupsi dana desa dengan membuat rekayasa proyek pembangunan pada tahun 2018-2019 yang mengakibatkan kerugian dana desa sebesar Rp.570 juta (Demokrasi, 2023).

Dari kasus di atas menjelaskan bahwa aparatur desa sangat berperan penting dalam terciptanya tata kelola yang baik di suatu wilayah. Jika

aparatur desa itu sendiri melakukan tindakan menguasai atas dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi maka implementasi tata kelola yang baik dalam wilayah tersebut tidak akan tercapai.

Hal tersebut juga sepemikiran dengan Wulandari, (2021) bahwa dalam suatu pemerintahan harus terdapat aparatur pemerintah desa yang mempunyai kompetensi memadai mengenai pengelolaan keuangan desa, hal ini mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, karena melihat nominal dana desa yang sangat besar memungkinkan terjadinya peluang kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Selain upaya pencegahan terjadinya kecurangan, aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan dana desa juga bisa menjadikan terlaksananya *good governance* dalam suatu pemerintahan tersebut. Hal itu sependapat Wafa dkk., (2020) dan Erliyanti et al., (2022), Ardiyanti & Supriadi, (2018) juga mengemukakan kompetensi aparatur pemerintah mempengaruhi implementasi *Good Governance* secara positif dan signifikan. Namun pendapat tersebut berbeda dengan penelitian Afandi et al., (2019) yang mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi *good governance*.

Dalam Sulaeman et al., (2019) Selain membutuhkan aparatur desa yang memiliki kompetensi baik, partisipasi masyarakat juga merupakan bagian penting dalam pemerintahan. Karena dengan mengajak masyarakat andil dalam pemerintahan adalah bentuk dari suatu proses yang dapat mengkomodasi masyarakat untuk mulai menyadari akan situasi problematis

yang mereka hadapi dan mencoba diha mencari jalan keluar yang dapat digunakan dalam memperbaiki masalah tersebut. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu wujud *good governance* yang menjadi kebutuhan mutlak dalam masyarakat. Dengan partisipasi, masyarakat bisa mengembangkan suatu pemerintah yang memiliki tata kelola yang baik.

Artinya, berbagai proses pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien dalam kerangka pemerintahan, baik dalam proses perumusan tingkat prestasi kerja, maupun dalam hal komunikasi antara pemerintah dengan sumber daya manusia, serta telah terbukti meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut sependapat dengan pemikiran, Ivanovik dkk., (2022), Wafa. et al., (2020) Erliyanti dkk., (2022), Wardani et al., (2019) dan Nugroho dkk., (2019) yang berpendapat partisipasi masyarakat mempengaruhi implementasi *good governance* secara positif dan signifikan. Namun pemikiran itu berbeda dengan penelitian Iswahyudi et al., (2017) yang mengemukakan partisipasi berpengaruh negative terhadap *good governance*. Dan Ultrafiah, (2017) menjelaskan partisipasi tidak mempengaruhi pengelolaan dana desa. Karena mengikutsertakan masyarakat tidak selalu menunjukkan pengelolaan dana di desa tersebut baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan No. 2 Tahun 2021 Pasal 4 terkait Pengalokasian, Penetapan Isi, Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, bahwasanya alokasi dana desa dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta kepentingan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dapat dikelola secara teratur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara efisien, ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan pemerataan serta kemaslahatan masyarakat. Dan prinsip penggunaan alokasi dana desa sesuai pada Pasal 5 menjelaskan alokasi dana desa digunakan khusus untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan yang sah dan diatur dan dikelola oleh desa (Peraturan BUPATI, 2021).

Selain itu, Kasi inter kejaksaan negeri Kabupaten Pekalongan Adhi Candra juga menegaskan terkait dana desa dan alokasinya itu bukan kekuasaan pribadi kepala desa. Hal ini dikarenakan mayoritas kepala desa yang beranggapan bahwa dana desa dan alokasi seluruhnya dikuasai dan dikelola oleh kepala desa. Adhi Candra menyampaikan Kepala/ pemimpin desa yang bertanggung jawab atas perkiraan pengelolaan dana desa, namun kepala desa harus menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dan mengingatkan agar pengelolaan dana desa dan pengalokasian dana desa di musyawarahkan kepala desa dengan mengundang BPD. (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta proses pencairan dana desa harus melalui sistem yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan dana desa juga harus sesuai dengan kebutuhan desa (Lubis, 2022). Di bawah ini merupakan rincian dana desa di kecamatan Tirto Tahun 2021.

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa

No	Nama Desa	Dana Desa Tahun 2020	Dana Desa Tahun 2021	Presentase (%)
1	Wuled	336.666.000	334.576.000	-0,621%
2	Ngalian	315.829.000	315.171.000	-0,208%
3	Pandanarum	353.988.000	355.260.000	0,359%
4	Karanganyar	343.882.000	346.558.000	0,778%
5	Silirejo	402.174.000	401.103.000	-0,266%
6	Pucung	326.939.000	327.602.000	0,203%
7	Dadirejo	468.073.000	434.671.000	-7,136%
8	Sidorejo	400.012.000	401.541.000	0,382%
9	Curug	340.749.000	339.144.000	-0,471%
10	Tanjung	296.966.000	296.672.000	-0,099%
11	Samborejo	418.999.000	418.624.000	-0,089%
12	Pacar	347.089.000	346.237.000	-0,245%
13	Karangjampo	386.333.000	382.076.000	-1,102%
14	Tegaldowo	383.798.000	383.401.000	-0,103%
15	Mulyorejo	352.044.000	355.690.000	1,036%
16	Jeruksari	413.130.000	408.150.000	-1,205%
Total Dana Desa		5.886.671.000	5.846.476.000	-0,683%

(Sumber : Peraturan BUPATI, 2021)

Tabel di atas menunjukkan jumlah alokasi dana desa dan presentase kenaikan atau penurunan dana desa yang dialokasikan ke 16 desa di

Kecamatan Tirto pada Tahun 2020-2021. Besaran dana desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah desa sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang ditetapkan sehingga dapat tercapainya tata kelola yang baik. Selain itu anggaran dana yang sudah diterima oleh seluruh desa di Kecamatan Tirto ini, diharapkan dapat direalisasikan secara maksimal berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa setempat yang diatur dan diurus oleh desa. Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, dan dana desa digunakan atau diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Tirto berjalan dengan baik dan terealisasi secara maksimal sehingga mampu menciptakan *good governance*.

Penelitian ini dilakukan di seluruh desa Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan karena masih minimnya penelitian yang dilakukan pada desa di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Di samping itu berdasar pada data dana desa dan alokasinya tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi kecurangan atau penyelewengan dana desa.

Hal tersebut merupakan pembelajaran adanya permasalahan kasus korupsi pada Pengelolaan dana desa di kecamatan Tirto yang terjadi pada Kepala desa Sidorejo periode 2013-2019 yang terjerat kasus korupsi dengan memperkaya diri sendiri senilai Rp.170,6 Juta. Selain itu Kepala desa Sidorejo juga tidak pernah mengirimkan laporan pertanggung jawaban dana

desa Sidorejo tahap 1 yang berimbas pada tidak cairnya dana desa tahap II dan Tahap II dan menjadikan pembangunan di desa Sidorejo terhambat (Info Plus, 2020).

Tindakan yang dilakukan kepala desa Sidorejo tersebut dinilai bertolak belakang dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan menteri dalam negeri tahun 2014 yang membahas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Karena pada dasarnya pengelolaan dana desa yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat sehingga dapat tercapainya tata kelola wilayah yang baik.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dan permasalahan di atas penulis menjadikan tema ini sebagai penelitian dengan mengangkat judul ***“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Good Governance di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah penulis pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa mempengaruhi *good governance* ?
2. Apakah Partisipasi Masyarakat mempengaruhi *good governance* ?
3. Apakah Transparansi mempengaruhi terhadap *good governance* ?

4. Apakah Akuntabilitas pengelolaan dana desa mempengaruhi *good governance* ?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap *good governance*
2. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap *good governance*
3. Menganalisis pengaruh transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap *good governance*
4. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap *good governance*

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan wawasan para akademisi tentang tata kelola wilayah yang baik. Sehingga penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan *good governance*. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan kebijakan sehingga penerapannya lebih transparan dan tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah serta masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Bagi peneliti selanjutnya dan mahasiswa diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang tata kelola wilayah yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dinilai dari kompetensi, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitasnya.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana mengelola wilayah yang baik dan tentang mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dari kompetensi, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabel itu sendiri. Sehingga masyarakat kedepannya lebih mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas pengaruh alokasi dana desa terhadap pencapaian *good governance* suatu wilayah baik dari perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa serta masyarakat bisa lebih mengawasi pemerintah desa dalam menggunakan alokasi dana desa dengan baik dan maksimal.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang akan dibagi menjadi beberapa sub bagian. Dibawah ini merupakan taksonomi penulisan yang akan digunakan:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab I akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya yang akan dibahas pada sub bab I bagian pendahuluan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori/ telaah pustaka, hipotesis dan kerangka berpikir yang akan dibahas pada sub bab II kerangka teori.

3. BAB III Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan mengenai metodologi penelitian apa yang digunakan dalam penelitian dan uji yang akan dilakukan, jenis penelitian, variable apa yang digunakan dalam penelitian dan populasi maupun sampel yang digunakan seperti sumber data dan uji statistik yang digunakan (Ghozali, 2020).

4. BAB IV Pembahasan

Paembahasan memaparkan hasil dari pengujian yang dipaparkan dalam metodologi penelitian dan di bahas pada sub bab analisis dan pembahasan. Pada bab ini juga akan menjelaskan dampak variabel independen terhadap variable dependen terkait pengelolaan dana desa terhadap pencapaian *good governance*.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini memaparkann terkait kesimpulan hasil pengujian atau pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu pada bagian ini juga membahas mengenai saran kepada peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governance* di Kecamatan Tirto
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Good Governance* di Kecamatan Tirto
3. Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Good Governance* di Kecamatan Tirto
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governance* di Kecamatan Tirto

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis tentunya masih memiliki kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yang peneliti sadari antara lain:

1. Keterbatasan responden karena banyaknya responden yang tidak selalu berada di kantor pemerintahan dan membuat peneliti tidak bisa mengawasi semua responden dalam mengisi kuisioner.
2. Keterbatasan objek dalam penelitian karena ada beberapa wilayah di kecamatan Tirto yang terendam rob dan banjir sehingga akses untuk menuju wilayah tersebut susah dan sangat terbatas.

3. Berdasarkan penelitian diperoleh nilai R-squared sebesar 0,463 yaitu 46,3% variabel independen yang mempengaruhi *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap *good governance* dibandingkan dengan variabel lainnya.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan penelitian maka ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa memperluas objek penelitian dan bisa menggunakan objek yang belum pernah di teliti sebelumnya.
2. Mencari referensi terbaru dan mengembangkan penelitian dengan menambah variabel tambahan seperti kekuasaan aparatur desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa meneliti terkait pengaruh kepala desa dalam pengelolaan sumber daya terhadap implementasi *good governance*.
4. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan teknik wawancara untuk melengkapi agar tidak hanya menggunakan kuisisioner saja sehingga dapat mengantisipasi bagi responden yang tidak objektif dalam mengisi kuisisioner.
5. Bagi Pemerintah desa di Kecamatan Tirto bisa meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi terkait pengelolaan dana desa sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai penyelenggaraan kebijakan pemerintah desa.

D. Implikasi Teoritis Praktis

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang “kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta good governance”. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat pada ilmu pengetahuan yang terkait dan bisa berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bisa berimplikasi bagi pemerintah agar tata kelola suatu wilayah bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini juga dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan untuk melakukan evaluasi di pemerintahan desa kecamatan Tirto terutama dalam hal terkait tata kelola wilayah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P., Chandrarin, G., & Subiyantoro, E. (2019). Village Funding Program Performance: Good Governance And Human Resources Competence Bancak District, Semarang Municipal Indonesia. *International Journal Of Scientific And Technology Research*, 8(12), 882–886.
- Amleni, W., Mentu, H., & Lake, Y. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.58290/Jmbo.V1i1.9>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), 1–20.
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” Dalam Mewujudkan Good Government Governance Di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner*, 3(2), 270. <https://doi.org/10.33395/Owner.V3i2.171>
- Bamyanti, L. N., & Dewi, N. A. W. T. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Kompetensi Pendamping Desa Terhadap Penerapan Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1), 888–900.
- BKT, R. K. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya*. KPPN Bukit Tinggi. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Desa. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15, 11–20. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/eps9d>
- Demokrasi, E. G. (2023). Kades Dan Bendahara Desa Glandang Pemalang Ditetapkan Tersangka Korupsi DD Rp. 570 Juta. *PUSKAPIK*. <https://www.puskapik.com/31419/berita/kades-dan-bendahara-desa-glandang-pemalang-ditetapkan-tersangka-korupsi-dd-rp-570-juta/>
- Erliyanti, Yuliani, R., & Hamdani. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Good Governance Pada

- Pengelolaan Keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11).
- Ghozali, I. (2020a). *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Ghozali, I. (2020b). *Partisal Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplukasi Menggunakan Program Smartpls 3.0* (2nd Ed.). Undip.
- Ghozali, I. (2020c). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)* (4th Ed.). Undip.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akutansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 3–251.
- Info Plus, R. (2020). *Korupsi Dana Desa Sidorejo Pekalongan Pak Kades Tilep Rp.170 Juta*. 8 Mei. <https://Infoplus.Id/2020/05/08/Korupsi-Dana-Desa-Sidorejo-Pekalongan-Pak-Kades-Tilep-Rp-170-Juta/>
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166. <https://doi.org/10.23887/Jia.V1i2.9992>
- Ivanovik, P., Siahaan, A., & Widajantie, T. D. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Air Batu*. 4(11), 4815–4824.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Lubis, R. (2022). *Dana Desa Bukan Kekuasaan Kepala Desa*. Info Anggaran. <https://Infoanggaran.Com/Detail/Dana-Desa-Bukan-Kekuasaan-Kepala-Desa->
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Public* (3rd Ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru* (Mardiasmo (Ed.); I). ANDI Offset.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan

- Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal Of Economic, Business And Engineering*, 1(1), 118–130.
- Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi)* (1st Ed.). Raja Grafindo Persada.
- Nainggolan, B. (2022). *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Penerbit Alumni.
- Novianti, L. (2016). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah* (1st Ed.). Al-Mujtahadah Press.
- Nugroho, A. P., Hardiwinoto, & Kristiana, I. (2019). Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Good Governance Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang). *Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional Unimus*, 2, 499–505.
- Peraturanbupati, P. (2021). *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021*. <https://jdih.pekalongankab.go.id/assets/peraturan/pb2021-2.pdf>
- Prabawa, S., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 269. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28232.2020>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Rendi Ahmad, N. (2020). *Tuntut Transparansi Dana Desa, Warga Pacar Geruduk Balai Desa*. RADARSEMARANG.ID. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/kajen/2020/06/27/tuntut-transparansi-dana-desa-warga-pacar-geruduk-balai-desa/>
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 31 No, 3301–3313. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.V31.I12.P20>
- Riyanto, L. A., Afifudin, & Roni Pindahanto Widodo. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). *Jurnal Respon Publik*, 15(2), 29–39.

- Saebani, B. A., & Sutisna, Y. (2018a). *Metode Penelitian* (1st Ed.). CV. Pustaka Setia.
- Saebani, B. A., & Sutisna, Y. (2018b). *Metode Penelitian* (1st Ed.). CV. Pustaka Setia.
- Sitoyo, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (Ed.); Cet 1). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. In *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Cet. 22). Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo (Ed.); 2nd Ed.). Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92. <https://doi.org/10.51817/Prj.V7i3.374>
- Sutrisno, E. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1 Cet. 5). Kencana Prenada Media Group.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (EDISI 3). Alfabeta.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. In *Universitas Muhammadiyah Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71.
- Wardani, P. L. I., Dewi, G. A. K. R. S., & Prayudi, M. A. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 10(3), 1–10.

Wulandari, N. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Empat Belas Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020)* SKRIPSI. Universitas Islam Indonesia.